PKM Pembuatan Cairan Handsanitizer dalam Peran Serta Penanganan Covid-19 Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Bersama PCM Kramat Jati dan Pemuda Muhammadiyah Kramatjati Jakarta Timur, DKI Jakarta

Marjan Miharja, Erwin Syahrudin, Gunawan, Meydi Nabillah, Rizal Apriyanto,

M. Kholilurrahman, & Rusnandi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Abstrak

The spread of Covid 19 has become one of the people's concerns even though at the time of the initial existence of this virus, various efforts in the form of appeals from the government had not really been obeyed by the community. In fact, most people think that the virus will not be as widespread as in the country where it first spread. Various hoaxes regarding weather and climate conditions in Indonesia as conditions that will not cause widespread spread or hoaxes related to ingredients or drugs that are considered to prevent the emergence of Covid 19 have actually been able to influence the public not to fully consider this virus as a threat. However, along with the public's concern about this virus, other impacts have emerged. The implementation of social distancing has had other impacts. In the form of social and economic impacts on society. With the above conditions, we, from STIH IBLAM, conduct a Community Service study program or what is commonly called PKM which with this activity we try to embrace the partnership of the Muhammadiyah Cawang East Jakarta Youth to produce useful products. The product that we will produce is a Hand Sanitizer which can be used to reduce the possibility of transmitting the pandemic outbreak that is currently happening. With our partnership, Pemuda Muhammadiyah making these products with current conditions is indeed not easy, but with the existing obstacles we try to keep making products that we mean with basic ingredients that are safe for our environment. The products we produce will be donated to the surrounding community in connection with the COVID-19 outbreak, maintaining cleanliness and maintaining a healthy environment which is one of the government's programs and recommendations, so that the spread of COVID-19 can be reduced and is also a preventive measure so that the outbreak does not get worse. extends. This PKM activity is carried out by Class 52.S1 of the STIH Iblam Department of Business Law in collaboration with the Cawang Muhammdiyah Youth partnership. The purpose of this activity is to meet the needs of the community for the importance of cleanliness by using safe materials and also to help the community by subsidizing hand sanitizers in the midst of the economic crisis due to the current pandemic. Our target is to assist the government in reducing the spread of the pandemic outbreak, as well as helping the government foster a sense of discipline in personal and environmental hygiene for the community, because personal and environmental hygiene will help us through this pandemic because cleanliness is the key for us to get through the current pandemic.

Keywords: Covid-19, pandemic, Indonesia

1. Pendahuluan

1.1 Analisis Masalah

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) termasuk mata kuliah lapangan yang menitik beratkan pada kerja dan sosialisasi mahasiswa/mahasiswi dimasyarakat. Kuliah ini berupa kerja yang dilakukan dimasyarakat, baik masyarakat sekolahan, masyarakat instansi/lembaga atau masyarakat umum. Mata kuliah PKM di STIH IBLAM Jakarta mempunyai sasaran pada masyarakat yang terkena wabah pandemi Covid-19.

Sesuai dengan jurusan dari Sekolah Tinggi yang kami tekuni skarang, kami coba melihat kembali Aspek Hukum Penanganan Penyebaran Covid 19. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being).

Istilah yang digunakan bukan “human rights”, tetapi “fundamental rights”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak hak Dasar”. Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara.

Untuk menindaklanjutiantisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Mengacu pada aturan-aturan di atas, kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu:

- a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
- c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- d. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- e. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- f. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid 19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Atas regulasi-regulasi tersebut maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah:

- a. Kebijakan Social Distancing/Physical Distancing

Adanya Social Distancing sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviral-kan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan social distancing harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya social distancing tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan social distancing karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik.

- b. Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan

Tenaga kesehatan berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi sehingga pemerintah perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19. Perlindungan tenaga kesehatan bergulir setelah ada tujuh dokter meninggal karena positif terinfeksi, kelelahan hingga serangan jantung sehingga dilakukan pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penentuan skala prioritas pemberian APD. Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan.

Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nampaknya belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekalipun sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan namun saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-undang Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan.

c. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kewenangan Pembatasan Sosial Berskala besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkak keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait. Kemudian atas kondisi darurat penyebaran Covid 19, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Dengan melihat beberapa aspek hukum diatas mengenai penanganan COVID-19, maka dapat disimpulkan demi sinergisitasnya pelaksanaan untuk penanggulangan pandemi ini perlu juga peran aktif dari berbagai pihak, kami sebagai mahasiswa hukum STIH Iblam merasa perlu berbagi dan mendukung pemerintah dengan beberapa regulasi yang telah dibuat. Bagi kami mahasiswa hal yang nyata yang bisa kami lakukan untuk negara ini sesuai dengan peran kami sebagai mahasiswa adalah kami akan mencoba menjalankan dengan maksimal Mata Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang sangat bermanfaat sebagai pembelajaran langsung dengan masalah yang nyata ada di lapangan saat ini. Kegiatan PKM kami ini bekerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah Kramatjati Jakarta Timur.

Kegiatan pertama kami adalah melakukan observasi ketempat Pemuda Muhammadiyah dengan melihat apa saja kegiatan yang bisa kami jadikan bahan PKM yang berhubungan dengan regulasi pemerintah tentang penanganan bencana COVID-19 nanti, mulai dari apa yang akan kami hasilkan, tempat pelaksanaan PKM, menganalisa kondisi lingkungan tempat mitra kami, produk yang dihasilkan, bahan bahan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Setelah melakukan observasi dan diskusi dengan pihak Pemuda Muhammadiyah beserta pembimbing maka diperoleh gambaran mengenai apa yang harus kami lakukan demi PKM ini. Gambaran ini memberikan informasi yang akan digunakan dalam kami menyusun program kerja dan target dalam PKM yang kami lakukan dan semua tetap dengan rencana kami membantu pemerintah dalam regulasi penanganan wabag COVID-19 ini.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mengidentifikasi masalah diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah masyarakat sudah memiliki hand sanitizer sebagai salah satu bentuk mengurangi penularan virus COVID 19?

1.3 Permasalahan Mitra

Berdasarkan pengamatan dan berdiskusi langsung dengan mitra didapatkan permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Mitra kekurangan sumber dana untuk membuat hand sanitizer yang untuk di bagikan ke masyarakat.
- Mitra masih membutuhkan tenaga bantuan agar dapat memproduksi hand sanitizer dalam jumlah yang banyak.

1.4 Solusi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka solusi yang ditawarkan pengusul melalui program pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

- Pendampingan pembuatan hand sanitizer.
- Penambahan dana untuk pembuatan hand sanitizer

1.5 Metode Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pembuatan hand sanitizer akan dilakukan di Muhammadiyah Dewi Sartika bersama dengan Pemuda Muhammadiyah Kramatjati Jakarta Timur.

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI PERMASALAHAN	METODE PELAKSANAAN
1.	Cara membuat cairan hand sanitizer	Dari permasalahan yang ada kami mencoba berkoordinasi dengan mitra kami, dan kami mendapatkan informasi cara membuat hand sanitizer dengan bahan bahan dan komposisi yang sudah sesuai standar kesehatan dan tidak ada efek samping yang dihasilkan.	Dari bahan bahan yang telah ada kami melakukan pencampuran bahan tersebut dengan komposisi secukupnya sesuai takaran dari brp liter desinfektan yang akan dibuat.
2.	Waktu dengan mitra banyak yang tidak sesuai sehingga perlu dikoordinasikan lebih lanjut.	Waktu adalah masalah yang sangat menjadi penentu akan kegiatan PKM ini, maka dari itu koordinasi dan menyesuaikan waktu dengan mitra adalah jalan keluar dari masalah ini agar semua rencana tetap berjalan dengan seharusnya.	Kami mencocokkan jadwal kegiatan kami dengan waktu kosong atau waktu senggang dr pihak mitra Pemuda muhammadiyah cawang, yang akhirnya program kami dapat berjalan sesuai rencana yang sudah kami buat tanpa harus mengurangi jadwal dari PKM.

1.6 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan awal dari kegiatan ini adalah kami melakukan observasi ke mitra dengan dengan beberapa kegiatan, sbb:

- Kunjungan ke PCM kramat Jati dan Pemuda muhammadiyah KramatJati
- Mendapatkan bimbingan dari PCM kramat Jati dan Pemuda muhammadiyah KramatJati tentang apa yang akan menjadi tema dalam PKM kali.
- Membuat Hand Sanitizer adalah arahan dari PCM Kramat Jati dan Pemuda Muhammadiyah Kramat Jati.
- Melakukan Baksos di lingkungan sekitar mitra berdomisili.
- Laporan harian dan dilaporkan ke ketua PKM.
- Laporan akhir Kegiatan di Muhammadiyah kramat Jati .

1.7 Jenis Kepakaran yang Diperlukan

Demi menunjang kegiatan kami, kami membutuhkan seorang yang memiliki kepakaran yang sangat mendukung kegiatan PKM ini, kepakaran yang kami butuhkan tidak jauh dari dunia kesehatan, kepakaran yang memahami bagaimana dan apa kandungan yang benar untuk proses pembuatan hand sanitizer ini . Untuk itu kami merangkul kemitraan Pemuda Muhammadiyah Kramat Jati karena mitra kami mempunyai kepakaran yang dimaksud dan memiliki kredibilitas baik yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan terarah.

2. Gambaran Metode Pelaksanaan Kegiatan PKM

Metode pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dalam mengatasi masalah masyarakat untuk menghadapi kondisi new normal yang dilakukan oleh Tim Pengabdian adalah menyumbang Produk Disinfektan yang telah kami buat bersama mitra PWPM DKI Jakarta yang nantinya oleh mitra 2 kami yaitu PCM Kramat Jati akan dibantu untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar mitra kami berdomisili.

3. Jadwal Pengabdian Masyarakat

NO.	TGL/HARI	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Kamis, 16 -11-2020	Bimbingan PKM Pengarahan tentang cara pembuatan proposal PKM dan pengenalan mitra PCM Kramat Jati dan Pemuda Muhammadiyah Kramat jati – Jakarta Timur untuk kegiatan PKM	Pembimbing Ketua PKM Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H.
2.	Kamis, 23-11-2020	Bimbingan PKM Pengarahan tentang kemitraan dan produk yang dihasilkan, menjelaskan tentang luaran dalam wajib dan tidak wajib yang akan	Pembimbing Ketua PKM Dr. Marjan Miharja,

		dihasilkan.	S.H.,M.H.
3.	Senin, 23-11-2020	Bimbingan Produk PKM Pengarahan tentang pembuatan hand sanitizer, dan penjelasan tentang komposisi produk, serta tahapan pembuatan hand sanitizer	Pembimbing Ketua PKM Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H. Mitra Pemuda Muhammadiyah Kramat Jati Apt. Guntur S.R, S.,Si.
4.	Kamis, 26-11-2020	Pembuatan Hand Sanitizer Pembuatan produk hand sanitizer dengan kapasitas 500 liter, yang akan dipandu oleh mitra pemuda muhammadiyah kramat jati.	Pembimbing Mitra Pemuda Muhammadiyah Kramat Jati Apt. Guntur S.R, S.,Si.
5.	Kamis, 26-11-2020	Bakti sosial kepada masyarakat sekitar	Pembimbing Mitra Pemuda Muhammadiyah Kramat Jati Apt. Guntur S.R, S.,Si.
4.	Kamis, 26-11-2020	Pengajuan Proposal PKM	Bertempat di STIH Iblam dan diuji oleh dosen STIH Iblam
5.	Kamis, 10-12-2020	Laporan harian kegiatan PKM Laporan harian kegiatan PKM ini akan kami buat dalam berbentuk jurnal dan kami laporkan kepada Ketua PKM STIH Iblam	
6.	Kamis, 31-01-2021	Seminar Laporan akhir kegiatan PKM Seminar Laporan akhir kegiatan PKM, kami akan memaparkan laporan kegiatan kami selama PKM di acara seminar yang akan	

		diselenggarakan ditempat mitra kami yaitu SMAS Muhammadiyah Cawang – Kramat Jati- Jakarta Timur – DKI Jakarta.	
--	--	--	--

4. Uraian Tugas (*Job Description*) Ketua, Anggota, dan Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H.	Ketua PKM	Dosen Ketua: Memberikan panduan, tata cara serta etika PKM di STIH Iblam serta menginformasikan tentang kemitraan untuk kegiatan PKM ini dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang program PKM STIH Iblam ini.
2	Dr (can) Erwin Syarudin, S.H.,M.H	Anggota PKM	Dosen Anggota: Membantu ketua PKM mengarahkan dan membimbing Tim Pengabdian untuk kelancaran kegiatan PKM ini.
3	Gunawan	Ketua	Ketua Pengabdian: Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan PKM kepada anggota pengabdian serta berkoordinasi dengan Mitra Pemuda Muhammadiyah Kramat Jati guna rencana produk yang akan dibuat dan mengatur waktu untuk bakti sosial sehubungan

			dengan COVID-19.
4	Meydi Nabillah	Anggota	Membantu ketua dalam pelaksanaan pembuatan proposala, pembuatan produk desinfektan dan pelaksanaan bakti sosial.
5	M Kholilurrahman	Anggota	Membantu ketua dalam pelaksanaan pembuatan proposala, pembuatan produk desinfektan dan pelaksanaan bakti sosial
6	Rizal Apriyanto	Anggota	Membantu ketua dalam pelaksanaan pembuatan proposala, pembuatan produk desinfektan dan pelaksanaan bakti sosial
7	Rusnandi	Anggota	Membantu ketua dalam pelaksanaan pembuatan proposala, pembuatan produk desinfektan dan pelaksanaan bakti sosial

Proses pembuatan Desinfektan:

- Masukan Ethanol 96% secukupnya kedalam wadah ukuran 10 liter
- Tambahkan Hydrogen Peroxide 3% secukupnya
- Masukan Glycerol 98% secukupnya
- Isi Wadah ukuran 10 liter dengan bahan yang sudah dicampur tadi dengan air matang dingin
- Setelah terisi penuh tutup wadah sesegera mungkin untuk menghindari penguapan
- Goyang kan wadah dengan perlahan agar bahan tercampur dengan rata
- Simpan selama 72 jam untuk memastikan tidak ada kontaminasi organisme dari wadah botol
- Hand Sanitizer siap digunakan

5. Kesimpulan

Membuat Produk Handsitizer yang aman dan ramah lingkungan itu tidak sesulit yang dibayangkan, jika kita tau dan paham kandungan serta aturan yang tepat maka kita dapat membuatnya sendiri dengan aman, hanya yang menjadi masalah disini adalah mendapatkan bahan bahan baku yang kadarnya sesuai dengan yang diinginkan, sehubungan dengan kepakaran mitra kami sehingga link pembelian bahan baku yang dimaksud bukan lagi menjadi masalah dan produk hand sanitizer dapat kami hasilkan.

6. Referensi

Durrotun Munafiah., & Risky Puji Wulandary., (2020, November) SEMON (SEMINAR ONLINE NASIONAL) KEBIDANAN ASUHAN PSIKIS DAN FISIK PADA PERSALINAN NORMAL OLEH PRAKTIK BIDAN MANDIRI (PMB) DI MASA COVID-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 2715-0496. (jkip.poltekkes-mataram.ac.id)

Marianus Mantovanny Tapung, Max Regus, Marsel Ruben Payong, Stefanus Turibus Rahmat, Frederikus Maigahoaku Jelahu., (2020) BANTUAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PESISIR YANG TERDAMPAK SOSIAL-EKONOMI SELAMA PATOGENESIS COVID-19 DI MANGGARAI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1858-3571, 2580-9628. (journal.uinmataram.ac.id)

Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang "Tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)".

Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 "Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat",

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan namun saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-undang Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).